

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Tinjauan Pustaka	8
5.1. Pengertian Pelaku Usaha	8
5.2. Pengertian Konsumen	11
5.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Garansi Produk Elektronik	14
6. Metode Penelitian.....	17
6.1. Tipe Penelitian	17

6.2.	Pendekatan	18
6.3.	Sumber Bahan Hukum.....	18
6.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
6.5.	Analisis Bahan Hukum	19
7.	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.	AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMBERIKAN GARANSI ATAS PRODUK	
2.1.	Hubungan Hukum Pelaku Usaha Produk Elektronik Dengan Konsumen	22
2.2.	Pengaturan Layanan Purna Jual Garansi Produk Elektronik di Indonesia	30
2.3.	Akibat Hukum Dan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Akibat Tidak Adanya Garansi Produk Elektronik	36
BAB III.	PENYELESAIAN HUKUM ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT TIDAK ADANYA GARANSI PRODUK ELEKTRONIK	
3.1.	Penyelesaian Di Pengadilan	46
3.2.	Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)	50
3.3.	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	65

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Burgerlijk Wetboek.

*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009
Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu
Jaminan / Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk
Telematika dan Elektronika.*